



PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS I B

**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Lamongan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani ;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Lamongan;
 - c. Bahwa pemilihan Koordinator dan Anggota Tim sebagaimana Hasil Rapat internal 2 Januari 2023 berdasarkan pada kompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan;
 - c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Lamongan
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Intergitas Menuju Wilayah bebas korupsi

dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Lamongan ;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 133 tahun 2022 tanggal 31 Agustus 2022, Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Lamongan;
- Kedua : Nama-nama Pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Lamongan;
- Ketiga : Tugas Tim sebagai dimaksud dalam diktum kesatu adalah :
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan zona integritas dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan
 - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Lamongan ;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN,



Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H



PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS I B

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI
LAMONGAN KELAS IB

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI LAMONGAN KELAS IB

1. Pembina Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.
2. Ketua Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Erven Langgeng Kaseh, S.H.,M.H.
3. Koordinator Teknikal Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Wahyu Probo Yulianto, S.H.,M.H.
4. Koordinator Operasional Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Marji, S.H.
5. Koordinator Area Manajemen Perubahan (Area I)
Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.
Anggota : 1. Hindra Sunu Septiawan, A.Md.
2. Hari Purnomo, SH.
3. Asan, SH.
4. Asri Asma Ulfa, S.E.
5. Intan Puspita Cahyaning P
6. Koordinator Area Penataan Tata Laksana (Area II)
Andi Muhammad Ishak, SH.,M.H.
Anggota : 1. Sigit Meinarno, SH.
2. Sukono, SH.
3. Leny Muji Astuti, S.H
4. Nur Sofiyah Gunawan, S.H.
5. Alimatus Sa'diyah.

7. Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Satriany Alwi, S.H.,M.H.
Anggota : 1. Yulia Firdawati, S.Ak.
2. Rahma Laila Ali, SH
3. Ukhti Khanifatul Khusnah, S.E.
4. Anang Bahar Wanda, SH
8. Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja (Area IV)
I Gde Perwata, SH.,MH.
Anggota : 1. Erfin Andiyanza, A.Md.
2. Kasinu Prasetyo Wahyudi, S.H.
3. Sukono.
4. Nova Widasari, S.E
5. Afif Amrullah
9. Koordinator Area Penguatan Pengawasan (Area V)
Olyviarin Rosalinda Taopan , S.H., M.H.
Anggota : 1. Subakir, SH.
2. Nafi'uddin, SH.
3. Kusno Efendi, SH.
4. Yahya Hobet, SH.
5. Desi Islamianur Fatimah, A.Md.A.B
10. Koordinator Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (Area VI)
Edy Alex Serayox, S.H.,M.H
Anggota :1. Nurul Evarani, SH.,MH
2. Syihabuddin, S.H.I.
3. Monica Mutiara Napitupulu, A.Md.
4. Tulus Kartono, SH.
5. M. Agus Wahyudi., S.H

KETUA PENGADILAN NEGERI LAMONGAN,

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H.